

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPUA BARAT
BIRO LOGISTIK**



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

SATKER : BIRO LOGISTIK POLDA PAPUA BARAT
PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RUMAH DINAS POLRES PEGUNUNGAN
ARFAK TIPE 45

TAHUN ANGGARAN 2025

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUMAH DINAS POLRES
PEGUNUNGAN ARFAK TIPE 45

1. Latar Belakang

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi baru di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentuk pada tahun 2003 sebagai pemekaran dari Provinsi Papua. Awalnya lebih dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian pada tahun 2007 dilakukan perubahan nama menjadi Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat terletak di ujung bagian barat Pulau Papua yang memiliki luas sebesar 102.955,15 km². Terdapat 12 Kabupaten dan 1 Kota pada Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak.

Kebutuhan tempat tinggal meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah banyak dilakukan pembangunan rumah dinas/rumah negara oleh berbagai lembaga pemerintahan yang salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, perumahan dinas Polri adalah rumah negara berupa bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai Polri dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri pada Polri. Untuk itu, Pemerintah bersama Biro Logistik Polda Papua Barat di dalam melaksanakan Perencanaan Teknis pada lokasi kegiatan di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pembangunan Rumah Dinas, Pemerintah bersama Biro Logistik Polda Papua Barat melakukan Pembangunan Rumah Dinas Type 45 M² 5 Unit Polres Pegunungan Arfak. Tujuan dibangunnya Pembangunan Rumah Dinas adalah untuk mendukung pelaksanaan, kelancaran tugas, dan kesejahteraan Polri.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Melakukan Perencanaan Teknik terhadap kegiatan pekerjaan konstruksi Meminimalkan kendala-kendala teknis yang sering dihadapi oleh Penyedia jasa konstruksi di lapangan dalam menerapkan desain yang memenuhi persyaratan spesifikasinya.

b. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pekerjaan konstruksi yang memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam spesifikasi (tepat mutu), dan dilaksanakan secara tepat biaya serta tepat waktu.

3. Sasaran

Sasaran dari Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah mendapatkan produk perencanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Type 45 M² 5 Unit Polres Pegunungan Arfak sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Ruang lingkup sasaran kegiatan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas adalah:

1. Lingkup Pekerjaan Perencanaan pembangunan Rumah dinas, yang terdiri dari komponen kegiatan :
 - Pekerjaan Persiapan.
 - Pekerjaan Arsitektur.
 - Pekerjaan Struktur/Sipil.
 - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
2. Tahap-tahap yang akan dilaksanakan adalah:
 - Persiapan Perencanaan termasuk survey.
 - Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.
 - Pengembangan Rencana Lanjutan
 - Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.
 - Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.
 - Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).
 - Persiapan Pelelangan.
 - Pelaksanaan tender
 - Pengawasan Berkala

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi yang disiapkan untuk pekerjaan Perencanaan berada di Kampung Ullong Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak.

5. Sumber Pendanaan

Pekerjaan ini dibiayai dari : SBSN Biro Logistik Polda Papua Barat yang bersumber dari SBSN. Biaya Pelaksanaan pekerjaan perencanaan teknis sebesar **Rp. 155.925.000.-** (*Seratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) termasuk PPN.

6. Nama dan

Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pengelola Kegiatan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

: **NUR SALAM HADI
ROMDHANI, S.E.**

Jabatan

: PPK

Satuan Kerja

: Biro Logistik Polda Papua Barat

Alamat

: Jln Trikora Maripi, Kelurahan
Anday, Manokwari Papua
Barat.

7. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu pelaksanaan ditentukan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.

8. Personil

No	Jabatan	Pengalaman (Tahun)	Jumlah Org	Waktu (bulan)	Pendidikan/ Sertifikat
1.	Team Leader	1	1	1	Pendidikan min. S1 Teknik Sipil/Arsitek, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Ahli

					Muda/Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7 atau SKA Arsitek Ahli Muda
2.	Ahli Bangunan Gedung	1	1	1	Pendidikan min. S1 Teknik Sipil, memiliki SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung – Ahli Muda atau Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung Jenjang 7
3.	Ahli K3	1	1	1	Pendidikan min. S1 Teknik Sipil/Arsitektur, memiliki SKA Ahli K3 Konstruksi – Ahli Muda atau Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7
4.	Cad Operator	-	1	1	Minimal D3 Teknik Sipil/Arsitektur
5.	Surveyor	-	1	1	Minimal SMK

9. Laporan Pendahuluan

Berisikan Pemahaman terhadap KAK, Metodologi dan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan dan hasil orientasi lapangan serta kerangka kegiatan yang harus dijelaskan seperti kegiatan persiapan, pengurusan perijinan, mobilisasi tenaga dan peralatan, jadwal pelaksanaan dan jadwal penugasan personil atau tenaga ahli serta program kerja
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) Rangkap.

10. Laporan Antara

Memuat spesifikasi bahan dan tata cara pelaksanaan serta syarat syarat pelaksanaan dan Daftar Kuantitas volume (BOQ) pekerjaan yang akan dilaksanakan

Laporan Spesifikasi Teknis harus diserahkan selambat-lambatnya: 15 (lima belas) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) Rangkap.

11. Laporan Akhir

Memuat gambar perencanaan teknis dan perhitungan volume dan biaya pekerjaan.

Seluruh dokumen yang tersebut pada klausul “Keluaran”, berupa:

- a. Laporan arsitektur
- b. Laporan perhitungan struktur termasuk laporan penyelidikan tanah (soil test)
- c. Laporan perhitungan mekanikal, elektrikal, dan perpipaan

(plumbing)

- d. Laporan perhitungan informasi dan teknologi
- e. Laporan tata lingkungan
- f. Laporan perhitungan Bangunan Gedung Hijau (BGH)
- g. Laporan perhitungan estimasi TKDN

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) Rangkap.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : Februari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NUR SALAM HADI ROMDHANI, S.E.
BRIPKA NRP 87051614